



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

LAPORAN **PPID** BANHUB KEPRI TAHUN 2025



www.banhub.kepriprov.go.id



@banhubkepri

BanHub
Kepri

LAPORAN TAHUNAN PPID**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU****TAHUN PELAPORAN 2025****1. PENDAHULUAN**

Laporan Tahunan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini mencakup kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Penghubung Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan, efektif, dan efisien.

2. GAMBARAN UMUM PPID BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Sebagai PPID Pelaksana di bawah koordinasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penghubung Daerah mengemban tugas untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan layanan Badan Penghubung Daerah.

3. RINGKASAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah ringkasan statistik kinerja pelayanan informasi publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 :

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi Publik

Berdasarkan klasifikasi jenis informasi yang dikelola, Badan Penghubung Daerah telah melakukan pemetaan dan pendokumentasian dengan total 40 Informasi dan Dokumen yang tersedia dalam sistem pengelolaan informasi publik. Rincian ketersediaan informasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Informasi Berkala	24 Dokumen	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin dan terjadwal. Contoh: Profil Badan Publik, Laporan Kinerja.
2.	Informasi Serta-merta	1 Dokumen	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara serta-merta.
3.	Informasi Setiap Saat	13 Dokumen	Informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik. Contoh: Daftar Aset, Peraturan internal.
4.	Informasi Dikecualikan	2 Dokumen	Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan uji konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Statistik Permohonan Informasi

Selama periode pelaporan, tercatat adanya aktivitas interaksi masyarakat terhadap layanan informasi sebagai berikut:

1) Total Permohonan Informasi: 0 (Nol)

Analisis: Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengajukan permohonan informasi secara resmi melalui mekanisme yang tersedia (front-end permohonan) pada tahun ini. Kemungkinan besar kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi melalui informasi yang telah tersedia secara proaktif (diunggah) dalam kategori Informasi Berkala atau Informasi Setiap Saat.

2) Permohonan Selesai: 0

3) Permohonan dalam Proses: 0

4) Pengajuan Keberatan: 0

Analisis: Nihilnya angka keberatan menunjukkan bahwa tidak ada sengketa informasi yang timbul terkait penolakan permohonan atau ketidakpuasan pemohon terhadap layanan PPID Badan Penghubung Daerah.

4. DAFTAR DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKELOLA

Data ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Informasi Setiap Saat, Informasi Serta-merta, dan Informasi Berkala.

a. Informasi Setiap Saat

Informasi publik yang dapat diakses kapan saja sesuai ketentuan

- 1) Daftar Informasi Publik (DIP)
- 2) SK Pembentukan dan Susunan Tim PPID
- 3) Maklumat Pelayanan PPID
- 4) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 5) Perjanjian Kerja Sama (MoU/PKS) dengan Pihak Ketiga
- 6) Surat Perjanjian Kemitraan
- 7) Surat Perjanjian Swakelola
- 8) Surat Penugasan/Pembentukan Tim Swakelola
- 9) Daftar Dokumen Kontrak
- 10) Surat Menyurat Pimpinan/Pejabat
- 11) Persyaratan & Izin yang Diterbitkan
- 12) Pelanggaran Pengawasan Internal
- 13) Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat

b. Informasi Serta-merta

Informasi publik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, yang wajib diumumkan secara serta-merta.

- 1) Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi berkaitan dengan Prosedur Keadaan Darurat

c. Informasi Berkala

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin dan terjadwal.

- 1) Alamat Lengkap Instansi
- 2) Ruang Lingkup (Kewenangan)
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Instansi
- 4) Struktur Organisasi Instansi
- 5) Profil Singkat Pimpinan Tertinggi
- 6) LHKPN Pimpinan Tertinggi
- 7) LHKPN Pejabat Eselon III
- 8) LHKPN Pejabat Eselon IV & Fungsional
- 9) Data Pejabat Struktural Fungsional di Lingkungan
- 10) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPA)
- 11) Ringkasan Realisasi Kegiatan yang Telah Dilakukan
- 12) Ringkasan Program Kegiatan yang Dilaksanakan
- 13) Laporan Keuangan (RBA, Neraca, DAK, Daftar Aset)
- 14) Realisasi Penggunaan Anggaran
- 15) Rencana Umum Pengadaan (RUP), SIRUP
- 16) Tata Cara Permohonan Informasi Publik
- 17) Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- 18) Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
- 19) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahunan
- 20) Peraturan, Keputusan, dan Dasar Kebijakan
- 21) Kajian Akademik Peraturan yang Disahkan
- 22) Informasi Kebijakan dalam Prosesnya Terbuka
- 23) Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu
- 24) Informasi Lain yang Dinyatakan Terbuka

5. INOVASI DAN PENGEMBANGAN LAYANAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi, Badan Penghubung Daerah telah melakukan beberapa langkah strategis:

a. Digitalisasi Dokumen

Mengunggah total 24 dokumen Informasi Berkala ke dalam platform digital agar mudah diakses oleh masyarakat secara daring.

b. Kepatuhan Klasifikasi

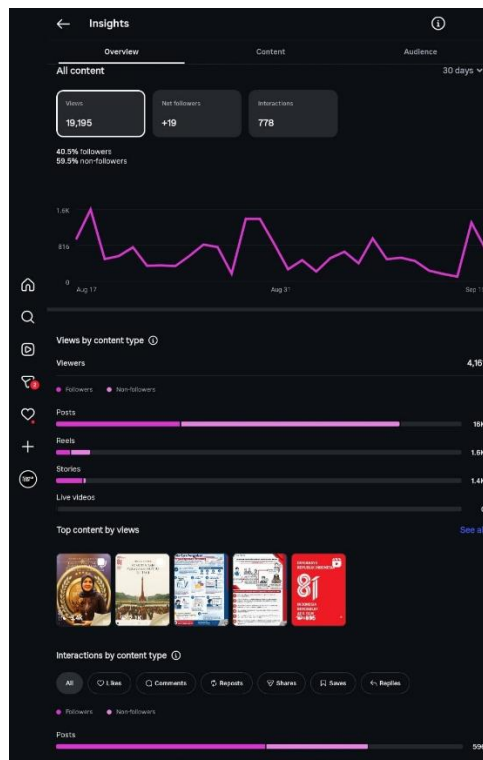
Memastikan seluruh dokumen, termasuk Profil Pejabat dan Aset Kekayaan serta Ruang Lingkup Kewenangan, telah diklasifikasikan dan diinventarisasi dengan baik untuk kemudahan pencarian kembali.

c. Mempertahankan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi di kantor Badan Penghubung Daerah di Jakarta, serta memastikan kelengkapan informasi di situs web resmi.

d. Penyediaan Fasilitas lainnya

Statistik dari media sosial Instagram banhub Kepri dari "Insights" sebagai berikut :

- 1) Ringkasan Utama (Overview): Total Views (Total Tayangan): 19.195. Ini adalah jumlah total berapa kali konten dilihat; Net followers (Pengikut Bersih): +19. Ini menunjukkan pertumbuhan pengikut baru selama periode tersebut, dikurangi pengikut yang berhenti mengikuti; Interactions (Interaksi): 778. Ini mencakup jumlah total suka, komentar, bagikan, simpan, dan balasan pada semua konten.
- 2) Demografi Pemirsa, Dari total pemirsa unik (4.161 pemirsa), terdapat pembagian berdasarkan status mengikuti: Followers (Pengikut): 40,5% dari total pemirsa. Non-followers (Bukan Pengikut): 59,5% dari total pemirsa. Sebagian besar jangkauan konten berasal dari orang yang belum mengikuti akun tersebut.
- 3) Grafik menunjukkan fluktuasi harian dalam jumlah penayangan terdapat lonjakan signifikan atau puncak penayangan sekitar pertengahan periode dan lonjakan tajam lainnya mendekati akhir periode. Secara umum, ada banyak variabilitas dengan beberapa hari di mana penayangan turun mendekati nol.
- 4) Jenis konten yang menghasilkan sebagian besar penayangan adalah: Posts (Postingan Feed/Galeri): 16K (16.000) tayangan. Ini adalah penyumbang utama views; Reels: 1.6K (1.600) tayangan; Stories: 1.4K (1.400) tayangan; Live videos: 0 tayangan.
- 5) Konten teratas berdasarkan views, Baris ini menampilkan lima kiriman teratas yang paling banyak dilihat. Tiga teratas Adalah 3,4K tayangan; 2,1K tayangan.



6. PENUTUP

Meskipun pada tahun ini tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tetap menganggap penting untuk terus memelihara dan memperbarui daftar informasi publik. Hal ini mencerminkan kesiapan instansi dalam menjalankan prinsip keterbukaan.

Ke depan, PPID Badan Penghubung Daerah akan terus berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai hak atas informasi dan menyempurnakan sistem pelayanan informasi agar semakin mudah, cepat, dan transparan,

Jakarta, September 2026

Tim PPID Pelaksana

Badan Penghubung daerah Provinsi Kepri